

pada tanggal 09 Juli 2014 untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden se-Indonesia periode 2014-2019.

Para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen dan kepala pemilih para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-program pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama yang telah ditentukan hingga menjelang hari pemungutan suara.

Banyak faktor yang mempengaruhi proses pemilu dengan sistem demokrasi, mulai dari kekuatan-kekuatan politik yang ada (institusi primordial baik yang bersifat keagamaan ataupun ke daerah), mesin-mesin politik yang ada (organisasi sosial politik atau kelompok kepentingan baik Partai politik, Organisasi Kepemudaan, dan Media), proses pencitraan, sosialisasi politik, dan kampanye yang dilakukan, yang pada dasarnya hal ini adalah instrument dari serangkaian usaha pemenangan, baik dalam kondisi PEMILU ataupun PEMILUKADA. Hal ini lumrah terjadi sejak bergulirnya Orde Reformasi yang membuka keran terhadap proses demokratisasi di Indonesia, dimana setiap partai politik berkompetisi dalam setiap pemilu, dan setiap partai politik memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan politik dalam pemilu. Periode 1988 sejak reformasi hingga sekarang atau masa transisi demokrasi Indonesia, proses demokratisasi Indonesia telah mengalami perubahan menuju perbaikan konsep dan pelaksanaannya. Dengan terciptanya Pemilu yang lebih transparan tanpa terlalu banyak intervensi ataupun tekanan, sebagai salah satu parameter kemajuan demokratisasi.

tersendiri dalam Sistem Politik Indonesia, dimana sebelumnya pada era penguasa orde baru pemilu hanya menjadi ajang seremonial untuk mempertegas Legitimasi pemerintahan. Strategi politik untuk memenangkan hati dan meraih simpati konstituen sebagai penentu dari suatu keputusan politik, dengan menggunakan berbagai pendekatan termasuk di dalamnya memperhatikan isu politik yang akan dijual kepada kelompok pemilih, memperhitungkan kekuatan sendiri, dan mengamati kemampuan partai pesaing yang menjadi rival politik. sehingga substansi dari proses pemilu legislatif sebagai representasi kekuasaan rakyat dengan hegemoni kekuasaan yang dimilikinya di dalam seluruh aspek baik sosial, ekonomi dan politik Indonesia.

Maka sudah seharusnya setiap partai wajib memiliki strategi untuk dapat mengulang suara yang signifikan dari konstituen, dengan konsep kemenangan yang terfokus guna memenangkan partainya, baik melalui pengorganisasian dan konsolidasi kader, menggunakan mesin kekuatan organisasi sayap yang di miliknya, penguasaan terhadap kondisi objektif yang ada dalam areal pertarungan politiknya, propaganda isu, dan sebagainya. Karena tanpa itu pengaruh dan kekuasaan mustahil diperoleh, maka pada prinsipnya kemenangan dalam Pemilu adalah harga mati bagi setiap Partai politik. Pada pemilu legislatif di kota Surabaya pada tanggal 09 April 2014 dari hasil penghitungan secara manual, partai berlambang banteng dengan moncong putih tersebut meraih sebanyak 346.320 suara.

Sebagai Partai Ideologis berasaskan Pancasila 1 Juni 1945, PDI-Perjuangan berperan aktif dalam usaha-usaha untuk mencapai cita-cita bersama di atas. Untuk itu, PDI-Perjuangan berketetapan menjadi alat perjuangan dan pengorganisasian rakyat. Sebagai alat rakyat, PDI-Perjuangan bertugas untuk:

Pertama, mewujudkan amanat penderitaan rakyat sebagaimana tercantum dalam cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. *Kedua*, menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah berbangsa dan bernegara; sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi rakyat; sebagai norma pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan dan anggota partai; dan sebagai cermin dari keseluruhan jati diri partai. *Ketiga*, mengantarkan Indonesia untuk berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai syarat-syarat minimum bagi perwujudan cita-cita bersama bangsa di atas.

Dalam Indonesia perjuangan mewujudkan cita-cita bersama bangsa, PDI-Perjuangan melaksanakannya melalui pengorganisasian dan perjuangan rakyat untuk mencapai kekuasaan politik dan mempengaruhi kebijakan dengan cara-cara damai, demokratis, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Membangun masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur;
3. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat;
4. Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis; dan berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menjadi alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa;
5. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
6. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

produk, organisasi, pasar dengan tujuan sebagai aktivitas terencana yang diimplementasikan secara simultan dan berkelanjutan. Reasoning yang mendasari Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono untuk menggunakan marketing politik pada pemilu presiden 2009 adalah membangun citra, simpati, dan dukungan. Oning Rollasina W.A (Program Studi Ilmu Politik FISIP UNAIR 2007), "*Strategi Politik Kandidat Dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus Kemenangan Suyatno dalam Pilkades 2006 di desa Gorilan*". Skripsi ini meneliti tentang strategi politik kandidat Suyatno dalam meraih kursi kepala desa di desa Gorilan. Skripsi ini menyorong strategi politik Suyatno dengan menggunakan konsep teori elit, perilaku pemilih, kampanye politik, kekerabatan, juga kekuasaan. Samad Umarama (Program Studi Bagian Politik dan Pemerintahan dalam Islam UIN Sunan Kalijaga 2009), "*Strategi Pemenangan Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu Legislatif 2004*". Dari strategi yang paling menonjol dan sangat efektif dalam menjangkau massa adalah *direct marketing* karena strategi ini langsung berhubungan dengan masyarakat bisa diketahui berapa kekuatan nyata yang mendukung PK Sejahtera. Strategi efektif lainnya adalah logika ketokohan. Logika ini sangat ampuh menjangkau massa ditengah budaya kepulauan Sula yang sangat kuat dengan tradisi paternalistik. Sebagai partai politik yang berdasarkan Islam. PK Sejahtera dalam aktifitas dan kegiatan berpartai tetap berpedoman pada ideologinya sebagai dasar atau pijakan dalam berpolitik. Keberhasilan partai dalam menerapkan strateginya pada pemilu lebih didasarkan pada komitmen terhadap

ideologi, tipologi partai dakwah yang dianutnya, dan konsisten terhadap upaya menegakkan Islam secara universal.

Khoiri (Jinayah Siyash Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014), "*Strategi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pilkada Yogyakarta 2011*". Kemenangan yang didapatkan PDI-Perjuangan merupakan upaya tim sukses dalam menggunakan metode strategi politik berupa komunikasi politik yang efektif, baik terhadap masyarakat pihak keraton dan simpatisan partai itu sendiri. Yang membedakan dengan skripsi saya yaitu dengan menggunakan strategi dari teori dan PDI-Perjuangan.

Proses penetapan Dapil DPRD Kota Surabaya sesuai Peraturan KPU No. 15 Tahun 2012 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hasil akhir rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan umum legislatif (pileg) 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, menunjukkan partisipasi pemilih Surabaya pada pileg lalu hanya 60 persen. Ketua KPU Kota Surabaya Eko Walujo mengatakan, ada dua acuan untuk mengetahui angka partisipasi pemilih di Kota Surabaya saat Pemilu legislatif 2014. Dia menjelaskan, kalau berdasarkan data daftar pemilih tetap (DPT), maka pemilih yang menggunakan hak suaranya sebesar 60 persen. Rinciannya tercatat 2.001.602 pemilih yang terdaftar sebagai DPT, namun yang mencoblos hanya 1.199.078 orang. Sementara itu jika ingin mengetahui partisipasi pemilih berdasarkan pemilih yang

terdiri dari daftar pemilih khusus (DPK), A5 hingga pindah pilih maka jumlah DPT menjadi 2.035.693 namun yang menggunakan hak pilih 1.233.094 atau sebesar 60,57 persen. Dua data itu dijadikan acuan untuk mengetahui partisipasi pemilih, rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan umum legislatif (pileg) 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. Eko menyebut ada peningkatan signifikan keikutsertaan pemilih Surabaya saat pencoblosan Pemilu legislatif 2014 dibandingkan Pemilu legislatif 2009 lalu. Pada 2009, partisipasi pemilih disebutnya mencapai titik nadir karena hanya 48 persen. Sedangkan keikutsertaan pemilih pada Pileg 2004 lalu sempat 78 persen dan pemilu legislatif tahun ini dikisaran 60 persen.¹⁰

¹⁰<http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/04/22/n4fxv5-partisipasi-warga-surabaya-di-pileg-2014-meningkat> 07 Desember 2014.

Berdasarkan tabel II terlihat jelas, bahwa tingkat keterwakilan PDI-Perjuangan di DPRD Kota Surabaya yang mengalami kenaikan dengan komposisinya, PDI-Perjuangan mendapatkan jatah sebanyak 15 kursi, Partai Demokrat mendapatkan 6 kursi, PKB, Gerindra dan PKS, sama-sama mendapatkan jatah 5 kursi di legislatif. Adapun Partai Golkar memperoleh 4 kursi sama dengan PAN. Untuk Hanura memperoleh 3 kursi, Nasdem 2 kursi dan PPP 1 kursi. Sedangkan PBB dan PKPI tidak mendapatkan kursi di DPRD Kota Surabaya di tahun 2014. Selanjutnya, dalam proposal ini penulis akan mengangkat bagaimana PDI-Perjuangan, sebagai suatu identitas kepartaian berproses melakukan upaya strategi pemenangan PDI-Perjuangan dalam pemilu legislatif di Kota Surabaya.

Pemilihan judul dilakukan atas dasar berkembangnya fenomena strategi yang digunakan pada wilayah politik, khususnya pada pemilihan umum 2014. Ada suatu alasan yang mendasari penggunaan strategi politik merebut kursi parlemen di tingkat DPRD Kabupaten/Kota, terutama pada pemilu tahun 2014. Di sisi lain, hasil dari penggunaan strategi berbeda untuk tiap, calon yang dinyatakan memenangkan pemilihan legislatif yang memiliki strategi lebih kompleks, tidak hanya digunakan dalam mengalahkan pesaing, namun juga berkaitan dengan koalisi, pembentukan tim sukses, menggunakan *money* politik hingga proses memperebutkan suara pemilih. Dalam arti, ada suatu strategi yang dilakukan sejak lama dan dipersiapkan secara matang untuk merebut suara pemilih khususnya untuk wilayah DPRD Kota Surabaya yang mengalami perubahan secara

merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang diinginkan.

Pemilu Legislatif : Pemilu legislatif adalah proses pemilihan umum untuk mengisi jabatan-jabatan politik di lembaga legislatif seperti: DPR, DPD, dan DPRD.

PDI-Perjuangan : Sejarah PDI Perjuangan berawal dari berfusnya PNI, IPKI, Partai Katolik, PARKINDO dan Partai Murba menjadi Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 10 Januari 1973. Di dalam perkembangannya, PDI menjadi PDI Perjuangan dalam bentuk badan hukum pada tanggal 1 Februari 1999. Di pimpin oleh Megawati Soekarnoputri.

Kota Surabaya : Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya memiliki luas sekitar 333,063 km² dengan penduduknya berjumlah 2.813.847 jiwa (2014). Surabaya terkenal dengan sebutan *Kota Pahlawan* karena sejarahnya yang sangat

